

MENGEJAR KELAMBATAN BUDAYA

J. Soodjati DJIWANDONO

Sudah seringkali kita dengar keluhan-keluhan selama ini bahwa pembangunan nasional yang telah kita laksanakan melalui Polita I terlalu berat sebelah, terlalu menitikberatkan bidang ekonomi dan kurang memperhatikan bidang-bidang politik dan sosial-budaya. Sebagai akibatnya timbullah kepincangan-kepincangan dalam masyarakat yang pada gilirannya menimbulkan kengoncangan-kengoncangan. Kurang meratanya hasil pembangunan ekonomi yang dinikmati oleh masyarakat melebarkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, yang memperkuat perasaan-perasaan frustrasi dan tak berdaya di antara rakyat banyak yang melihat dengan kesal kemewahan hidup segelangan kecil yang kaya. Apalagi pembangunan ekonomi dengan aparat pemerintahan sebagai pelaksana yang masih dihindangi mental "mumpang" dan mental korup nampak masih tetap menciptakan kelas orang-orang kaya mendadak dengan jalan-jalan menyelowong.

Dalam bidang politik kita saksikan cetusan-cetusan perasaan tidak diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan, dalam kegiatan dan tanggung jawab pembangunan berupa partisipasi dalam perumusan rencana pembangunan; kekecewaan-kekecewaan karena kurangnya komunikasi antara pihak penguasa dan masyarakat dan karena sifat tertutupnya pemerintah serta kurang pekanya terhadap koreksi-koreksi, kritik-kritik, dan kontrol dari lapisan bawah, bahkan lembaga-lembaga penyalur pendapat rakyat-pun telah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Di samping itu kita masih merasakan terbengkelainya masalah pendidikan yang belum jelas arah dan tujuannya, banyaknya anak-anak yang tidak tertampung di sekolah-sekolah yang sebagian hanya menambah jumlah pengangguran dan masalah-masalah sosial lainnya. Kita dengar keluhan-keluhan tentang adanya pengaruh negatif daripada beberapa aspek kebudayaan asing, sedang pertumbuhan kebudayaan nasional belum jelas arahnya, bahkan kadang-kadang usaha-usaha untuk membina kebudayaan nasional dan merupuk kepribadian nasional memberi kesan akan dihidup-hidupkannya kembali aspek-aspek yang berbau feodal dan kolonial yang sebenarnya sama-sama tidak kita kehendaki.

Kita akui pada umumnya bahwa kemajuan-kemajuan ekonomi sedikit banyak memang terasa ada. Tetapi sayang bahwa kemajuan-kemajuan dalam bidang itu belum lagi diimbangi dengan kemajuan di bidang mental pada umumnya sehingga seringkali terasa benar ketidakserasian antara kemajuan ekonomi itu dengan keseluruhan cara hidup rakyat kita. Lagi pula kemajuan ekonomi betapapun sedikitnya menimbulkan tuntutan-tuntutan yang semakin meningkat sehingga tumbuhlah suatu pola konsumsi yang tidak tepat yang pada akhirnya menghilangkan arti kemajuan itu sendiri.

Meskipun demikian jelas tidak relevant lagi, kurang realistis dan terlalu bersifat akademis semata-mata untuk mempersoalkan apakah masyarakat kita telah benar-benar siap untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, dan apakah tidak sebaiknya lebih dahulu kita melaksanakan pembangunan dalam bidang-bidang di luar ekonomi sekaligus mempersiapkan diri untuk pada waktunya memulai pembangunan ekonomi. Memperdebatkan masalah itu kita akan ketinggalan kereta api.

Masalah yang lebih relevant pada waktu ini kelihatannya ialah apakah dengan pengalaman di masa yang baru lalu dengan pelaksanaan Pelita I yang terlalu menitikberatkan pembangunan ekonomi dengan segala akibat dan konsekwensinya yang negatif kini kita harus memindahkan titik berat pembangunan pada bidang-bidang di luar ekonomi, ataukah seperti telah dicantumkan dalam GBHN terus mengutamakan pembangunan pada bidang ekonomi sedang pembangunan di bidang-bidang lain untuk menunjang pembangunan ekonomi itu, tetapi mungkin dengan memberi perhatian lebih besar pada bidang-bidang itu, ataukah harus disusun pola pembangunan masing-masing bidang politik dan sosial-budaya di samping pembangunan ekonomi.

Pembangunan nasional yang kita laksanakan memang bukanlah semata-mata pembangunan ekonomi, bukan semata-mata bertujuan untuk mengejar kesejahteraan materiil. Cita-cita yang hendak kita capai dengan usaha-usaha pembangunan adalah terbentuknya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam arti materiil dan spirituil sekaligus. Meskipun demikian, betapapun kelemahan-kelemahan daripada suatu pola pembangunan yang menitikberatkan bidang ekonomi dengan segala kemungkinan akibat negatif dalam bidang-bidang lain sehingga mengurangi arti daripada kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan yang demikian, kiranya akan terlalu sulit untuk mengambil alternatif yang sebaliknya dengan mengalihkan prioritas pembangunan pada bidang-

bidang non-ekonomis. Kesulitan utama dalam hal ini akan disebabkan oleh sulitnya diukur taraf kesejahteraan yang non-materiil sifatnya sehingga sulit ditentukan sasaran-sasaran yang nyata dalam penyusunan suatu rencana pembangunan yang mengutamakan bidang-bidang non-ekonomis, khususnya bidang politik dan sosial-budaya. Tentu saja secara teknis tidak akan terlalu sulit untuk dalam beberapa hal menentukan sasaran-sasaran nyata seperti misalnya berapa jumlah pusat-pusat kebudayaan atau kesenian akan didirikan, berapa jumlah mesjid atau gereja akan dibangun demi peningkatan kehidupan spirituil, dan berapa jumlah sekolah dari masing-masing tingkatan harus dibangun. Pada akhirnya perhitungan semacam itu lebih bersifat ekonomis yang menyangkut pembiayaan tanpa jelas tujuan yang sebenarnya hendak dicapai. Bahkan perencanaan dalam bidang pendidikan khususnya persekolahan akan banyak berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang akan ikut menentukan jumlah dan macam tenaga kerja yang akan diperlukan. Ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa tujuan pendidikan semata-mata adalah menciptakan tenaga kerja, tetapi toh itu merupakan sebagian daripada tujuan pendidikan yang harus dicapai dalam rangka keseluruhan tujuan pembentukan manusia seutuhnya.

Atas dasar itu kiranya tidak cukup feasible untuk mengalihkan prioritas pembangunan pada bidang-bidang non-ekonomis. Dan atas dasar pemikiran yang serupa nampaknya tidak workable pula untuk menyusun rencana-rencana pembangunan dalam masing-masing bidang non-ekonomis apabila rencana-rencana demikian tidak dikaitkan dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan ekonomi sebagai pegangan dan pedoman dalam mana dapat ditentukan secara lebih nyata sasaran-sasaran perbaikan dan kemajuan. Sudah barang tentu pada akhirnya taraf kesejahteraan materiil-pun sukar diukur dengan angka-angka, oleh karena kesejahteraan materiil-pun, apalagi spirituil, adalah sesuatu yang bersifat relatif dan subyektif. Akan tetapi sekurang-kurangnya dalam bidang materiil dapat ditentukan tahap-tahap yang lebih jelas.

Oleh karena itu nampaknya alternatif yang paling workable adalah menורותkan dan meningkatkan pembangunan nasional dengan tetap mengutamakan bidang ekonomi, akan tetapi sementara itu pembangunan dalam bidang-bidang lain mendapatkan perhatian yang lebih besar daripada yang sudah-sudah. Ini mengandung arti bahwa lebih besar dana harus disediakan untuk pembiayaan pembangunan dalam bidang-bidang ini mungkin tanpa hasil-hasil

yang nyata kelihatan seperti hasil-hasil dalam bidang ekonomi, sehingga dari segi ekonomis sepiantas lalu mungkin kelihatan sebagai pemborosan dana seperti untuk menyalurkan partisipasi yang lebih aktif kelompok-kelompok masyarakat dalam usaha-usaha pembangunan, untuk saluran komunikasi yang lebih terbuka, dan meluaskan dan meningkatkan berbagai bentuk penyuluhan dan pendidikan dalam berbagai bidang. Pembangunan dalam bidang-bidang itu sangat penting untuk menunjang pembangunan ekonomi dalam arti bahwa tidak saja sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tidak akan mudah tercapai tanpa pembangunan dalam bidang-bidang non-ekonomis itu, tetapi juga bahwa pembangunan yang bersamaan dalam bidang-bidang lain itu akan memungkinkan berkembangnya kemampuan masyarakat untuk menampung akibat-akibat kemajuan ekonomi yang dinikmatinya dan sekaligus menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi sampai seminimum mungkin akibat-akibat negatif yang mungkin timbul karena kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi. Tanpa sasaran pembangunan ekonomi akan sukar dicapai, dan walaupun tercapai, akan banyak kehilangan nilai dan artinya oleh akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh kurangnya kemampuan masyarakat untuk menampungnya, karena adanya suatu "cultural lag" atau kelambatan budaya.

Kita telah merasakan akibat daripada derap kemajuan ekonomi yang tidak diimbangi oleh tingkat yang memadai daripada kemajuan dalam bidang-bidang sosial, politik, budaya dan mental. Sebagai contoh yang sangat sederhana dapat kita lihat betapa kemajuan teknologi yang dapat dinikmati berkat adanya kemajuan ekonomi telah membuat lebih banyak orang memiliki alat-alat teknologi modern. Tetapi oleh karena kurangnya peningkatan dan perkembangan sikap-sikap mental tertentu yang harus membarengi kemajuan teknologi dan ekonomi, seperti rasa tanggung jawab terhadap kepentingan dan ketertiban umum, rasa hormat terhadap hak-hak orang lain, dan sebagainya, maka penggunaan alat-alat semacam itu atau cara-cara menikmati hasil-hasil kemajuan tadi menimbulkan masalah-masalah sosial baru seperti gangguan terhadap ketenteraman umum dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dengan berbagai akibatnya yang negatif.

Peningkatan pembangunan dalam bidang-bidang non-ekonomis tentu saja akan melibatkan ahli-ahli perancang lain di samping ahli-ahli ekonomi, tetapi yang akan tetap mempergunakan

sasaran-sasaran dalam rencana pembangunan ekonomi sebagai petunjuk dan pedoman, sehingga segala perencanaan pembangunan dalam bidang-bidang itu tetap merupakan bagian integral daripada rencana pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh atau komprehensif meskipun sekali lagi dengan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi sebagai intinya. Di sinilah diperlukan kerjasama yang erat antara perencanaan-perencanaan ekonomi dan perencanaan-perencanaan sosial, politik, dan budaya. Dalam hubungan ini kiranya perlu diyakini bahwa tidaklah berfaedah dan tidak relevant sebenarnya untuk mempersoalkan siapakah yang lebih penting peranannya dalam kerjasama itu, atau bidang mana yang lebih penting dalam pembangunan nasional kita, sebab semuanya penting dan saling menunjang, saling melengkapi, dan saling mengisi. Begitu pula orang-orang yang terutama bergerak dalam bidang-bidang politik dan sosial-budaya tidak perlu mengada-ada dan tersinggung pride dan rasa kehormatannya apabila dikatakan bahwa pembangunan dalam bidang-bidang itu ditujukan untuk "menunjang" pembangunan ekonomi, oleh karena pada gilirannya kemajuan ekonomi pasti akan menunjang pula pembangunan dan kemajuan dalam bidang-bidang lain. Sebenarnya tidak berfaedah atau relevant pula mempersoalkan bidang mana dulu yang harus menunjang bidang apa. Meskipun dikatakan bahwa pembangunan dalam bidang-bidang lain adalah untuk menunjang pembangunan ekonomi, untuk memulai suatu pembangunan ekonomipun diperlukan titik tolak suatu taraf sosial budaya tertentu sebagai penunjang yang memungkinkannya, begitu pula sebaliknya dalam hal pembangunan dalam bidang-bidang non-ekonomis yang memerlukan titik tolak suatu kemampuan ekonomi tertentu.

Akhirnya perlu dikemukakan bahwa bukan saja dalam hal pembangunan ekonomi, tetapi lebih-lebih khususnya dalam bidang-bidang sosial, politik, budaya dan mental, serta dalam mengejar kelambatan budaya kita tentu tidak dapat semata-mata menggantung diri pada usaha-usaha pemerintah. Pemerintah dengan rencana pembangunannya dapat menyediakan kesempatan dan sarana-sarananya yang diperlukan, tetapi apakah kita masing-masing mau berusaha secara sadar mengembangkan dan meningkatkan dalam diri kita masing-masing sikap-sikap mental tertentu untuk menyongsong dan mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan sehingga dengan demikian masing-masing dan secara bersama-sama kita mulai dengan diri kita sendiri mempertebal rasa tanggung jawab dan pengabdian terhadap kepentingan dan ketertiban umum, menanankan disiplin dalam diri kita sendiri dan

di lingkungan kita sendiri, rasa hormat terhadap hak-hak orang lain, toleransi, tenggang rasa, menjauhkan diri dari perbuatan korup dan melanggar hukum? Apakah kita sanggup mengembangkan dalam diri kita sendiri masing-masing suatu sikap mental pembangunan lengkap yang diperlukan dengan mendidik diri sendiri dan membudayakan diri secara terus-menerus? Sungguh suatu tantangan bagi kita semua dari segala lapisan masyarakat.